

ABSTRAK

Dalam implementasi paket kebijakan ekonomi XV, Joko Widodo, selaku presiden Indonesia, menyatakan bahwa agar setiap K/L menargetkan beberapa aturan yang menyusahkan pengusaha dan investor untuk dicabut agar iklim investasi tidak hanya membaik tetapi benar-benar bergerak maju. Dalam rangka melakukan penyederhanaan tata niaga ekspor impor Bea Cukai memberlakukan kebijakan *post-border* yangmana bertujuan untuk mendukung iklim investasi di dalam negeri; menurunkan *dwelling time* dan *logistic cost*; serta memperbaiki peringkat EODB. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak adanya pengawasan barang kiriman lartas *border* dan *post border* serta mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan barang kiriman lartas *border* dan *post border* pada Kantor Pos Lalu Bea Plemburan di bawah pengawasan KPPBC TMP B Yogyakarta. Metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan studi literatur dan dokumen serta data sekunder bersumber dari rekapan data yang telah dikumpulkan oleh KPPBC TMP B Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *post border* berdampak positif bagi laju kegiatan impor di Indonesia, namun kebijakan ini membuat peran DJBC dalam rangka pengawasan tata niaga impor menjadi melemah. Pada penerapannya, Bea Cukai tidak bisa mendapatkan data yang akurat terkait kesesuaian antara barang yang diimpor dengan pemberitahuan impornya karena keterlambatan pegawai atas pengawasan barang lartas *post border*. Selain itu, kurangnya pemahaman importir terhadap peraturan ini tak jarang menimbulkan permasalahan antara petugas pengawasan dengan importir.

Kata kunci: barang lartas, impor, *post border*, *border*

Abstract

In the implementation of the XV economic policy package, Joko Widodo, as the president of Indonesia, stated that every Ministry or Institution targets several regulations that make it difficult for entrepreneurs and investors to be repealed so that the investment climate will not only improve but actually move forward. In order to simplify the import-export trade system, Customs and Excise enforces a policy of post border which aims to support the domestic investment climate; reduce dwelling time and logistics cost; and improve EODB ranking. The purpose of this study was to determine the impact of the supervision of border and post border consignments as well as identify and analyze problems in the implementation of supervision of border and post border consignments at the Lalu Bea Plemburan Post Office under the supervision of KPPBC TMP B Yogyakarta. The method used by the author is qualitative with literature and document studies as well as secondary data sourced from data recap that has been collected by KPPBC TMP B Yogyakarta. The results of the study show that the post-border policy has a positive impact on the pace of import activities in Indonesia, but this policy weakens the role of DJBC in monitoring the import trade system. In its application, Customs and Excise cannot obtain accurate data regarding the conformity between imported

goods and their import notification due to employee delays in supervising post border goods. In addition, the importer's lack of understanding of this regulation often creates problems between the supervisory officers and the importer.

Keywords: lartas goods, import, post border, border